

**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA
TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Srir Astu Swasti Prajabyah

Salam Indonesia Raya !!!

Yth Wali Kota Salatiga

Yth Wakil Wali Kota Salatiga

Yang kami hormati :

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga

FORKOMPINDA Kota Salatiga

Sekretaris Daerah Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga beserta seluruh jajarannya

Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas di lingkungan Setda Pemerintah Kota Salatiga

Para Camat, Lurah Dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga, puji syukur kehadiran Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkenannya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal-afiat. Dan semoga kita selalu diberikan petunjuk serta bimbingannya. Amiin.

Rapat Paripurna yang kami hormati, sehubungan dengan penyampaian Nota Keuangan RAPERDA Tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 maka kami Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa RAPERDA Tentang Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 adalah merupakan suatu acuan demi terwujudnya pembangunan yang mengacu kepada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kami dari Fraksi Gerindra memberikan masukan kepada pemerintah Kota Salatiga dimana Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 harus sesuai dengan perencanaan yang tidak pernah terpisahkan dengan rencana pembangunan daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer mengalami kenaikan yang cukup besar ini patut kita apresiasi, namun perlu kita ingat bahwa ini harus disertai dengan data pendukung yaitu apakah potensi-potensi yang ada sudah tergarap dengan maksimal? karena kita belum

pernah tahu data tentang potensi pendapatan, termasuk dari beberapa OPD belum dapat menyajikan data yang konsisten dan selalu berubah, karena masih banyak potensi yang belum tergarap dengan maksimal.

Untuk Pendapatan Transfer baik dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah, seluruh OPD harus mempelajari indikator-indikator mana yang bisa memberikan penambahan nilai terkait dengan prestasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena dengan prestasi yang diperoleh berdasarkan indikator penilaian terhadap penghasilan transfer itu sangat berpengaruh terhadap punishment dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

3. Terkait dengan OPD sumber penghasil harus bisa melakukan baik secara intensifikasi dan extensifikasi terkait dengan tugas pokok fungsi yang melekat pada OPD penghasil. Karena ada beberapa OPD penghasil yang belum melakukan suatu terobosan-terobosan untuk mengoptimalkan pendapatan.
4. Belanja Operasi dalam hal ini Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan yang cukup besar sebesar Rp. 66.602.869.869,- (Enam Puluh Enam Milliar Enam Ratus Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Hal ini perlu dikaji ulang karena untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa seharusnya bisa direncanakan secara matang pada saat pembahasan APBD penetapan.
5. Terkait dengan Belanja Daerah apabila disandingkan dengan Pendapatan Daerah masih terjadi defisit yang cukup tinggi sekalipun didalam belanja harus disesuaikan dengan pendapatan yang ada. Memang dalam hal ini harus ada rasionalisasi terkait dengan anggaran yang diajukan oleh masing-masing OPD terkecuali apabila dalam penggunaannya untuk pemenuhan Belanja Pegawai dan kebutuhan rutin.
6. Diharapkan kepada seluruh OPD apabila itu OPD penghasil dengan adanya penambahan anggaran harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk menaikkan pendapatan. Sedangkan OPD yang mengutamakan pelayanan dengan penambahan anggaran harus semakin meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
7. Perlu kita perhatikan bahwa salah satu sumber untuk menutup defisit adalah silpa, maka perlu adanya management silpa yang benar-benar bisa digunakan atau silpa bebas, maka kedepan harus mendapat perhatian sehingga tetap aman didalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Perlu kita ketahui bahwa APBD Tahun 2025 ini merupakan APBD yang sangat sulit, sehingga memang perlu pencermatan agar di tahun 2026 tidak terulang lagi. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam rangka menutup defisit kemarin, banyak dilakukan refocusing atau rasionalisasi hampir disetiap OPD.
9. Perlu adanya perencanaan yang matang dari masing-masing OPD, sebagai contoh adanya beberapa pokir yang tidak bisa dilaksanakan oleh OPD, dan yang lebih parah lagi tidak ada konfirmasi dari OPD kepada pengaju pokir (Anggota Dewan). Diharapkan untuk tahun-tahun kedepan bisa lebih diperbaiki sehingga bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat luas.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra DPRD Kota Salatiga terhadap RAPERDA tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025. Atas perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Salam Indonesia Raya !!!

Salatiga, 08 Agustus 2025

FRAKSI GERINDRA DPRD KOTA SALATIGA

- | | |
|---|----|
| 1. Heri Subroto, SE., SH., MH. (Ketua) | 1. |
| 2. Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE., MM. (Wakil Ketua) | 2. |
| 3. Siti Inayah, A.Md. (Sekretaris) | 3. |
| 4. Yuliyanto, SE., MM. (Anggota) | 4. |